



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN  
TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA  
KELOLA**

**NOMOR: 2.6.1/UN32.10/KS/2025  
NOMOR: 123.1../145../101.2023./2025**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **2**, bulan **Juni** tahun **2025**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muladi, S.T., M.T, Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Varian Syahtama Dhamar Aji, S.STP, Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta 17, Demangan, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63133, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi bagian Pemerintah Kota Madiun yang mengelola pendapatan daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**PASAL 1  
KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul menyangkut:

- (1) Program studi yang terlibat dalam perjanjian kerjasama ini adalah D4 Akuntansi;
- (2) Praktik Kerja Lapangan atau Magang oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di industri selama 5 (lima) bulan;
- (3) Penerimaan mahasiswa magang oleh pihak ke dua akan disesuaikan tergantung dengan kuota yang tersedia.

**PASAL 3  
TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

2

1

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menerima dan menempatkan peserta didik/ peserta magang/ peserta On The Job Training sesuai dengan departemen yang ada, yang telah disepakati sebelumnya dengan **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. Mendapatkan pendampingan oleh **PIHAK KEDUA** ketika **PIHAK KESATU** melakukan kunjungan industri kepada peserta didik/ peserta magang/ peserta On The Job Training
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Memenuhi kebutuhan **PIHAK KEDUA** dengan mengirimkan peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training dengan kriteria / kompetensi yang sesuai dengan standard SOP **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah membekali peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training dengan knowledge dan performance sehingga siap beradaptasi dengan dunia kerja
  - b. Memastikan semua peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training memiliki asuransi / BPJS
  - c. Membantu memberikan pengarahan kepada peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training terkait dengan perjanjian kerjasama
  - d. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
  - e. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Menyalurkan dan menempatkan peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training sesuai kesepakatan awal dengan **PIHAK PERTAMA** pada departemen yang ada ; dan
  - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Melindungi dan bertanggung jawab serta mengadakan pengawasan terhadap peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training selama berada di area kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
  - b. Mengeluarkan Sertifikat untuk peserta didik / peserta magang / peserta On The Job Training
  - c. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



d. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) bulan dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6**  
**DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 5 (lima) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 7**  
**BIAYA KEGIATAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


**PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU:**

##### **FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Arzendy Berlian Sabrina, S.Pd., M.Par.  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : arzendysabrina.fv@um.ac.id

#### **PIHAK KEDUA:**

##### **BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN**

Nama : Varian Syahtama Dhamar Aji, S.STP.  
Jabatan : Subkoordinator Perencanaan dan Kepegawaian  
Alamat : Jalan Soekarno – Hatta 17, Demangan, Kec. Taman, Kota  
Madiun, Jawa Timur 63133  
Telepon : 082192881117  
Surel : Bapenda17mdn@gmail.com

### **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 12  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,



**Dr. Muladi, S.T., M.T**

NIP. 196806041997021001

**PIHAK KEDUA**

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun  
Subkoordinator Perencanaan dan  
Kepegawaian,



**Varian Syahnama Dhamar Aji, S.STP**

NIP. 199307122015071003

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

2

1